



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALFIAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **476395**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.997.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/364 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 756 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. Tanah Seluas 3795 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 3850 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 9300 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 782.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 245.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 GM/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 152.800.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 62.759.431

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----



Sub Total	Rp.	2.457.559.431
III. HUTANG	Rp.	879.629.643
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.577.929.788

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.